

Liberalisme dan Identitas Nasional sebagai Pulchrum Bangsa Indonesia; Terang Filsafat Keindahan Aquinas

Raimundus Awur¹, Armada Riyanto², Mathias Jebaru Adon³

^{1,2,3}Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia

¹awurraimundus6@gmail.com, ²fxarmadacm@gmail.com, ³mathiasjebaruadon@gmail.com

Abstrak

Fokus tulisan ini adalah menggali pengaruh liberalisme terhadap bangsa Indonesia dan identitas nasional dengan pendekatan pustaka dan kualitatif. Melalui analisis literatur, penulis mengidentifikasi kompleksitas problematika liberalisme di Indonesia dan dampaknya terhadap struktur masyarakat yang majemuk. Kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan pustaka terfokus pada pemahaman konsep identitas nasional, menggali aspek-aspek kunci dan menelaah literatur yang terkait dengan perkembangan identitas nasional dalam konteks masyarakat majemuk. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi dan menilai realitas sosial, mengintegrasikan pemahaman dari kajian kegiatan pengabdian masyarakat dalam konteks konkret Indonesia. Fokus analisis adalah hubungan kompleks antara paham masyarakat liberal dan identitas nasional, yang terbentur dalam dinamika sosial dan politik. Pulchrum, sebagai konsep penengah, dihadirkan dalam terang filsafat Thomas Aquinas, menggambarkan keindahan harmonis antara liberalisme dan identitas nasional. Analisis filosofis pulchrum mengarah pada pemahaman bahwa harmoni antara kebebasan dan nilai-nilai tradisional dapat menciptakan suatu keindahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara liberalisme dan identitas nasional di Indonesia, serta potensi untuk mencapai pulchrum sebagai solusi harmonis. Implikasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi landasan bagi pemikiran holistik dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan nilai-nilai lokal maupun nasional, menciptakan masyarakat yang kuat dan bersatu dalam keberagamannya.

Kata Kunci: Identitas Nasional, Indonesia, Liberalisme, Pulchrum Aquinas.

Abstract

This paper delves into the impact of liberalism on Indonesia and national identity through a literature review and qualitative research. The author identifies the complexities of liberalism in Indonesia and its effects on the diverse societal structure. The literature review focuses on understanding national identity, exploring key aspects, and analyzing relevant literature in the context of a diverse society. Qualitative methods are used to evaluate social reality, integrating insights from the literature review into Indonesia's specific context. The primary analysis centers on the intricate relationship between liberal ideologies and national identity, navigating the dynamics of social and political spheres. Introducing Pulchrum, a mediating concept based on Thomas Aquinas's philosophy, the paper depicts a harmonious balance between liberalism and national identity. The philosophical analysis suggests that harmony between freedom and traditional values can create beauty in Indonesian society. The research yields profound insights into the complex relationship between liberalism and national identity in Indonesia, emphasizing the potential for achieving harmonious solutions. The implications of this study provide a basis for holistic thinking, balancing freedom with local and national values to foster a strong, united, and diverse society.

Keywords: National Identity, Indonesia, Liberalism, Pulchrum Aquinas.

PENDAHULUAN

Indonesia sekarang masih menduduki titik terendah mengenai pahamnya terhadap liberalisme. Orang lain masih terlalu dekat mengurusi kehidupan individu lain (tertentu). Kebebasan gerak dan kebebasan berpikir atau berpendapat pada posisi tertentu masih lemah. Hal-hal yang menentang prinsip liberalisme yakni prinsip di mana meyakini akan kebebasan individual wajib dihormati. Sudah menjadi tugas pemerintahan menjaga dan menjamin rakyatnya, dalam berekspresi berpendapat dan berpikir. Jika anda ingin berpendapat dan berpolitik, apa partai politik anda? Jika ingin suara anda di dengar, siapakah anda dan apa latar belakang anda? Di rumah sakit anda akan dilayani lebih dahulu jika anda adalah anggota-pemerintahan dan penguasa. Anda akan dilayani lebih baik jika anda memiliki status dan ekonomi anda terpandang. Hak kaum minoritas belum terpenuhi. Sering mendapat perlakuan tidak wajar dan tidak manusiawi. Dan masih banyak contoh lain yang melatar belakangi lemahnya liberalisme. Pemerintah terlalu menganggap penting dirinya sendiri, penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, hak-hak minoritas terus dilangkahi, korupsi, kolusi dan nepotisme terus-menerus berkembang. Kemelaratan dan kemiskinan dimana-mana. Hak kaum kecil dan tertindas tidak diperhatikan.

Literatur terdahulu menerangkan, ketidakpuasan lain masyarakat liberal di Indonesia adalah ketidakmampuan mereka untuk sesering mungkin menyajikan visi positif tentang identitas nasional kepada warganya. Teori liberal mengalami kesulitan besar dalam menarik batasan yang jelas seputar komunitasnya sendiri, dan menjelaskan apa yang harus diberikan kepada orang-orang di dalam dan di luar batas tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam deklarasi universal Hak Asasi Manusia, semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini, tanpa perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. (diterjemahkan oleh penulis). Para liberal secara teoritis peduli dengan pelanggaran hak asasi manusia di mana pun di dunia mereka terjadi. Banyak liberal tidak suka dengan keterikatan partikularistik (tertentu) dari para nasionalis, dan percaya bahwa mereka adalah warga dunia.

Indonesia, dengan segala keberagaman budaya, suku, dan agama, menciptakan realitas sosial yang kompleks dan unik. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan, juga menciptakan tantangan dalam upaya menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan identitas nasional. Salah satu fenomena yang muncul dalam dinamika ini adalah eksistensi liberalisme, sebuah pandangan dunia yang membawa implikasi mendalam terhadap struktur masyarakat. Problem liberalisme di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan, terutama ketika belum terkoordinasinya pemahaman dan implementasi nilai-nilai liberal dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Latar belakang ini menciptakan suatu konteks yang menarik untuk melihat bagaimana liberalisme berinteraksi dengan identitas nasional Indonesia. Meskipun negara ini telah berhasil meraih kemerdekaan dengan semangat nasionalisme yang kuat, pertanyaan tentang bagaimana liberalisme dapat bersinergi atau bertentangan dengan identitas nasional tetap menjadi suatu dilema. Khususnya, ketika melihat kompleksitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan kepercayaan.

Indonesia, dengan segala keberagaman budaya, suku, dan agama, menciptakan realitas sosial yang kompleks dan unik. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan, juga menciptakan tantangan dalam upaya menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan identitas nasional. Salah satu fenomena yang muncul dalam dinamika ini adalah eksistensi liberalisme, sebuah pandangan dunia yang membawa implikasi mendalam terhadap struktur masyarakat. Problem liberalisme di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan, terutama ketika belum terkoordinasinya pemahaman dan implementasi nilai-nilai liberal dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Latar belakang ini menciptakan suatu konteks yang menarik untuk melihat bagaimana liberalisme berinteraksi dengan identitas nasional Indonesia. Meskipun negara ini telah berhasil meraih kemerdekaan dengan semangat nasionalisme yang kuat, pertanyaan tentang bagaimana liberalisme dapat bersinergi atau bertentangan dengan identitas nasional tetap menjadi suatu dilema. Khususnya, ketika melihat kompleksitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan kepercayaan.

Situasi konkret di Indonesia mencerminkan ketegangan antara paham liberal dan identitas nasional sebagai suatu dinamika yang seringkali kompleks dan menantang. Terdapat sejumlah faktor dan peristiwa yang

menciptakan ketidakselarasan antara paham liberal dan identitas nasional, pada gilirannya dapat diinterpretasikan sebagai ketidakharmonisan yang menghambat penciptaan pulchrum, atau keindahan dalam keseluruhan masyarakat. Upaya memperkenalkan kebebasan individu dan pemikiran bebas sering kali dihadapi resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang melihatnya sebagai bentuk pengaruh asing yang merusak nilai-nilai lokal. Kedua, isu-isu kontroversial terkait hak-hak minoritas dan kebebasan berekspresi juga menjadi sumber konflik. Tantangan dalam mengakomodasi keragaman dan memastikan hak-hak individu tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional seringkali memunculkan ketegangan antara paham liberal dan identitas nasional yang dianggap sebagai penjaga keutuhan budaya. Selain itu, situasi politik dan ekonomi yang kompleks turut memainkan peran dalam membentuk ketidaksepakatan antara paham liberal dan identitas nasional. Pemilihan umum, ketidaksetaraan ekonomi, dan isu-isu korupsi menjadi faktor-faktor yang dapat menguatkan narasi nasionalis dan menghambat perkembangan nilai-nilai liberal dalam masyarakat.

Namun, melihat situasi ini sebagai sebuah konflik tanpa solusi tidak mencerminkan potensi terciptanya pulchrum. Dengan pandangan yang bijaksana dan filosofi Keindahan Aquinas sebagai panduan, dapat diartikulasikan bahwa harmoni antara kebebasan liberal dan nilai-nilai lokal dapat menjadi bentuk keindahan yang menguntungkan masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap konsep pulchrum sebagai keselarasan antara kebebasan dan nilai-nilai tradisional dapat membuka jalan menuju penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, menciptakan keharmonisan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penting dipahami bahwa liberalisme, dengan segala prinsip kebebasan dan hak individu, dapat dianggap sebagai suatu elemen yang memperkaya dan memperluas perspektif masyarakat. Tantangan muncul ketika prinsip-prinsip ini tidak selaras dengan nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam budaya dan identitas nasional Indonesia. Oleh karena itu, sebuah pendekatan filosofis yang mendalam diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara liberalisme dan identitas nasional, dan di sinilah filsafat Keindahan Aquinas muncul sebagai pencerahan yang potensial. Keindahan Aquinas, seiring dengan warisan filosofisnya, menawarkan suatu pandangan yang mengedepankan harmoni dan keseimbangan. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bagaimana konsep keindahan dapat menjadi perekat yang mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan merenungkan pulchrum sebagai suatu konsep yang tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga moral dan spiritual.

Dalam tulisan ini, akan menjelajahi hubungan antara paham masyarakat liberal dan identitas nasional di Indonesia, mengeksplorasi kendala yang dihadapi, dan merinci konsep Keindahan Aquinas sebagai suatu landasan filosofis untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan kita dapat melihat liberalisme dan identitas nasional sebagai suatu pulchrum, di mana kebebasan individu dan kesatuan nasional dapat saling melengkapi dan memperkuat, menciptakan suatu masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Liberalisme, dengan memberikan ruang untuk ekspresi dan kebebasan individu, dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan identitas nasional yang dinamis. Sebaliknya, identitas nasional yang kuat dapat memberikan landasan moral dan budaya bagi pelaksanaan prinsip-prinsip liberal, menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis. Dari Aquinas, kita dapat menemukan pemersatu yang tidak hanya menghargai keindahan fisik, tetapi juga keharmonisan antara kebebasan dan tanggung jawab. Sebagai masyarakat yang pulchrum, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana keberagaman dapat diartikulasikan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Dengan menggali nilai-nilai kebijaksanaan dan keindahan, kita dapat membentuk arah ke depan yang memadukan kekayaan liberalisme dengan keberlanjutan identitas nasional.

METODE

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni tinjauan kepustakaan dan refleksi filosofis terkait liberalisme di Indonesia dalam terang Thomas Aquinas. Tinjauan kepustakaan mengenai liberalisme dan identitas nasional sebagai pulchrum bangsa Indonesia yang digaungkan oleh Thomas Aquinas dari aneka sumber buku, jurnal, prosiding dan juga hasil proses kegiatan belajar mengajar dalam mengikuti kuliah filsafat metafisika. Pulchrum sebagaimana yang diguangkan oleh seorang Aquinas menjadi fondasi dalam hidup kita untuk memahami lebih jauh tentang liberalisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia dalam hal ini diajak untuk melihat perbedaan atau kemajemukan sebagai satu kesatuan yang indah. Setiap kebebasan dari masyarakat atau individu tertentu, harusnya mencerminkan nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa. Hal inilah yang menjadi sorotan atau temuan pemahaman yang baru, tentang bagaimana sejatinya masyarakat menghadapi keberagaman dan menjalankan paham liberal. Kebaruan yang diambil adalah masyarakat menjadi lebih paham akan perannya sebagai individu dalam suatu sistem ketatanegaraan. Tatanan negara hanya akan mengatur individu pada batasnya dan tidak semua hal personal diatur oleh negara. Meskipun demikian individu juga tetap tunduk di bawah tatanan di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya ialah kita dituntut untuk memiliki rasa empati dan tanggung jawab di dalam sebuah negara yang mengutamakan pulchrum yang merujuk pada nilai-nilai kebijakan moral dan etika. Keindahan itu akan tercapai ketika perpaduan nilai kebijakan moral dan etika bersatu. Liberalisme yang dimaksudkan bukan soal kebebasan di dalam bertindak tanpa berpikir. Melainkan liberalisme yang dimaksudkan dalam konteks negara indonesia ialah liberalisme kebebasan berpikir yang tidak menentang dengan hukum ketatanegaraan.

Liberalisme adalah Indah

Liberalisme berasal dari Bahasa latin liber, yang mempunyai arti bebas. Istilah ini mula-mula merujuk pada falsafah kebebasan. Di beberapa negara eropa sangat ketat dengan prinsip ini. Berapa dekade terakhir sejak awal abad dua puluh di berapa negara di eropa dan Amerika, Prancis dan negara lain di uni eropa telah memprogresifkan liberalisme terlebih sebagai penunjang perkembangan politik, sosial dan ekonomi. Pemenuhan akan kebutuhan dan peningkatan ekonomi, keadilan sosial dan politik dalam negara, secara nasional dan internasional, bagi Masyarakat liberal pemerintah adalah alat yang harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk menerapkan prinsip keadilan yang nyata di bidang tersebut demi tercapainya kesejahteraan bersama, kebaikan dan kebenaran. Liberalisme sejatinya tidak memiliki tujuan lain, selain daripada memajukan kesejahteraan manusia karena sepenuhnya ditujukan bagi prilaku manusia di bumi ini. Pertama-tama liberalisme bukan menjanjikan kebahagiaan dan kesenangan material melainkan yang lebuh berdimensi spiritual karena menyangkut hak asasi Manusia (HAM).

Liberalisme berdasarkan prinsipnya adalah memperhatikan HAM, tidak saja memperhatikan kesejahteraan lahiriah tetapi juga upaya menciptakan kesejahteraan Rohani. Kesejahteraan Rohani dalam artian adalah menciptakan sesuatu yang baik bagi diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Orang lain bukan pembatas kebebasan individu tertentu dan juga hak mereka tidak dapat diinjak oleh karena hak individu lain. Liberalisme harusnya baik bagi semua orang dan bukan hanya kelompok tertentu saja, ini adalah kebahagiaan terbesar dari Sebagian besar orang. Kebahagiaan yang tercapai inilah yang kemudian sebagai keindahan liberalisme. Cita-cita besar liberalisme adalah meningkatkan kesejahteraan semua, bukan dari tujuan yang dicapai, melainkan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan itu. Tujuan Masyarakat liberal bukan mendukung kepentingan kelompok khusus, melainkan mendukung keadilan. Keadilan merupakan suatu tindakan masuk akal, sehingga dapat diterima sebagian besar orang, dan harus jelas dibedakan dari tindakan yang tidak masuk akal. Sehingga dapat dengan jelas menemukan dasar-dasar kebijakan liberal.

Liberalisme sangat erat kaitannya dengan pola hidup individu, dan berbeda dengan sekumpulan orang/masyarakat. Seorang individu meskipun masuk pada suatu masyarakat atau kelompok khusus, ia akan tetap berpikir tentang keperluan dirinya. Apakah itu menguntungkan atau malah merugikan dia. Meski demikian, seorang sangat perlu masuk pada suatu masyarakat agar ia dapat bekerjasama didalamnya. Kerjasama memiliki kelebihan, dikarenakan produktivitasnya akan semakin besar. Produktifitas yang dihasilkan oleh kerja sama tersebut jauh lebih banyak dari pada yang diproduksi sendiri-sendiri, karena di dalam kelompok khusus yang bekerja sama ada prinsip pembagian kerjanya. Pembagian rupanya akan semakin indah dan adil bila hal milik pribadi tetap diperhatikan. Perhatian akan hak milik inilah yang menjadi keindahan dari suatu masyarakat liberal. Masyarakat liberal abad delapan belas, sangat tertuntun oleh gagasan akan hukum alam dan pencerahan, karena mereka menganggap bahwa semua orang sama, dengan demikian diharuskan ada kesetaraan hak politik dan hak sipil. Francis Fukuyama dengan sangat jelas menyebutkan dalam bukunya, bahwa semua orang memiliki hak yang sama di bawah hukum. Maka disinilah peran negara dan pemeritahan akan sangat diperlukan dalam perjalanan Masyarakat liberal. Kaum liberalisme sangat menghargai dan memegang teguh hal ini, bahwa negara merupakan sebuah keharusan mutlak dan perlu karena negara memiliki peran yang sangat penting sehingga perlindungan tidak hanya

terkait hal milik pribadi tetapi lebih dari itu adalah mengenai perdamaian yang menjadi cita-cita dan keindahan besar kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tanpa perdamaian keuntungan akan hak milik pribadi tidak terpenuhi.

Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika, mengakui bahwa manusia berhak atas dirinya sendiri dan bagaimana ia mengatur haknya sendiri. Dirinya adalah keutamaan dan tidak dihalang-halangi oleh pemerintah atau kelompok agama, demi mencapai kebahagiannya, kenyamanan dirinya, dan rasa aman sebagai manusia. Dalam artian bahwa mereka berlindung dibawa prinsip Human Rights atau HAM. Paham kaum liberalisme adalah keinginan terdalam akan kebebasan bagi Masyarakat, terlebih khusus masyarakat kecil yang tidak memiliki kuasa pada bidang tertentu. Paham tersebut menginginkan adanya ideologi dengan karakteristik kebebasan. Misalkan kebebasan berpikir bagi individu-individu. Individu-individu liberal tidak ingin adanya pembatasan, dari pemerintah atau agama terhadap kebebasannya. Kebebasan mereka semestinya dihargai dan menuntut haknya, serta berekspresi. Ekspresi diri setiap orang dianggap sebagai keharusan karena mampu untuk berpikir, sehingga tidak seorang pun selain dirinya berhak untuk mengatur kepribadiannya. Hal tersebut berlaku untuk segala hal, termasuk dalamnya agama, etnis, atau orientasi seksual.

Meskipun Masyarakat liberal sangat individualis, menekankan hak individu, tetapi saja ia akan masuk dalam suatu kelompok sosial masyarakat yang lebih luas. Jika Masyarakat liberal ingin mengerti dan merasakan keadilan maka penolakan akan hidup bermasyarakat dan bernegara tidak dibenarkan. Kritik terhadap pengertian keadilan Rawls oleh kaum komunitarian, bahwasannya Rawls telah mereduksi individu dengan pandangan universalisme. Keadilan menurut MacIntyre tidak pernah sebagai suatu yang universal. Melainkan berkaitan dengan tradisi kelompok atau komunitas tertentu. Contohnya adalah keadilan bagi masyarakat Jawa berbeda dengan keadilan orang Batak. Dari hal ini dipahami bahwa tradisi membentuk konsep—keadilan. Demikian pula liberalisme bukan merupakan konsep rasionalitas universal tetapi suatu bentuk tradisi. Karena merupakan suatu tradisi maka, liberalisme melihat keadilan itu tidak akan tercipta dengan sikap netralitas. Sikap netralitas adalah sikap dimana distribusi hak dan kewajiban disetarakan. Kesetaraan hak dan kewajiban tidak dibenarkan begitu saja untuk pencapaian keadilan bersama. Karena dalam kebersamaan sebagai masyarakat yang plural adil atau keadilan tidak pernah setara, karena adanya keadilan yang prosedural. Konsep Tyler (1989;1994) tentang keadilan—prosedural merupakan hubungan pembuat keputusan dengan individu yang terlibat proses pengambilan keputusan. Dalam masyarakat plural kerap kali timbul konflik antar anggota berdasarkan kepentingan masing-masing dalamnya. Dalam artian ada kecendrungan bersikap tidak—adil dan akan menyentil SARA (suku, ras, gender dan agama/antar golongan). Maka, kaum komunitarian menganjurkan agar keadilan itu lebih dilihat dari nilai-nilai. Misalnya nilai kebersamaan, kebenaran, kebaikan, selaras dengan akal budi, obyektif dan indah.

Indahnya liberalisme dapat terlihat dari beberapa pengertian bahwa liberalisme Liberalis memiliki cita-cita, untuk mengangkat individu otonom untuk dunianya sendiri. Terlepas dari kelemahan dan kekurangannya secara fisik, secara metafisik ia adalah being yang membebaskan diri dari pasang penghalang kebebasan dirinya sebagai individu yang berekspresi sebagai manusia. Liberalisme dan individualisme adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Seorang pemikir liberal asal Filipina, Julio Teehankee mendefinisikan Liberalisme menjadi enam bagian penting: Pertama, tentang individualisme, bahwa menurut kaum liberal individu adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan demikian individu oleh prinsip liberal harus selalu diberi kebebasan akan hak-haknya (Kolektivisme adalah persoalan kedua). Kedua adalah Rasionalisme, Kaum liberal meyakini dunia memiliki struktur rasional yang dapat kita paham secara logis, maka keteraturannya dapat dikritis secara terus-menerus. Ketiga, adalah kebebasan. Sesuai pengertiannya liberalisme melihat kebebasan sebagai yang paling penting. Tidak ada kata lain yang lebih penting lagi. Karena, kebebasan menyangkut kemampuan berpikir dan bertindak sesuai determinasi. Bertindak dengan mata hati/hati nurani (conscience).

Keempat, berkaitan dengan tanggungjawab. Tanpa tanggungjawab kebebasan akan menjadi liar dan semena-mena. Maka, liberalisme akan terlihat seperti liarisme. Liberalisme merupakan bebas dan bertanggung jawab. Kelima, Keadilan: keadilan adalah nilai moral tertinggi kaum liberal. Kaum liberal harus menjunjung tinggi nilai tersebut. Dalam artian tidak ada hak yang dikorbankan oleh karena hak orang lain. Karena keadilan memberi kesempatan kepada setiap individu untuk menggapai hak-haknya dan juga bersaing untuk hak-hak tersebut. Dan keenam, adalah toleransi. Menekankan sikam kaum liberal untuk

dan menghormati, menerima tindakan serta pandangan orang lain. Sekalipun pandangan tersebut belum disetujuinya tetapi demi kebersamaan dan kerukunan hidup, toleransi itu ditegakkan. Pertanyaan-pertanyaan penting yang kerap kali muncul, dan seketika juga menjadi keprihatinan adalah mengenai liberalisme dan national identity. Liberalisme memiliki tantangan yang ditimbulkan oleh kebutuhan akan identitas nasional, dikarenakan secara universal liberalisme merujuk pada kebebasan individu dan keutamaannya ialah mencakup hak asasi manusia. Sedangkan identitas nasional menuntut agar Masyarakat liberal harus berada pada suatu hukum dan ketatanegaraan atau yuridiksi tertentu. Manusia sebagai makhluk yang bebas akan diberi suatu tantangan agar kebebasannya tidak semena-mena demi kebutuhannya sendiri, tetapi perlu juga memperhatikan kepentingan bersama, terlebih dalam prinsip manusiawi dan hak asasi manusia. Hak seorang sebagai pribadi tidak bisa menjadi topeng pembelaan atau senjata untuk menekan dan mengerdilkan hak individu atau pribadi yang lain.

Pulchrum/Indah

Pulchrum dari Bahasa Yunani “kalos” berarti indah, baik, memikat. Dalam suatu kesempatan pertemuan perkuliahan bersama Prof. Armada Ryanto, dijelaskan bahwa keindahan tampaknya berhubungan atau berurusan dengan obyek yang dilihat, diraba, dipikirkan, dinilai. Obyek dalam artian adalah sesuatu yang dikenai oleh akal budi dalam aktifitasnya, maksudnya ialah, sesuatu itu indah karena sesuatu itu sebagai obyek yang menampilkan keindahan. Keindahan juga tampaknya dapat dilihat dari lain pihak yakni berhubungan dengan kapasitas sentimental dan intelektualitas subyek dalam memandang, melihat dan memberi nilai terhadap sesuatu. Thomas Aquinas, keindahan adalah sesuatu yang bila kita menemukannya atau mendapatkannya, kepuasan, kelegaan dan sukacita dapat dirasakan. Timbul kedamaian hati yang mendalam. Kedamaian sebagai keindahan merupakan bagian dari kebaikan itu sendiri. Keindahan adalah baik. Keindahan menambah sesuatu pada kebaikan, pribadi maupun kebaikan bersama. Sedangkan plato melihat keindahan/kecantikan bukan itu yang cantik/indah dalam dirinya sendiri. Indah atau cantik merupakan itu yang diingini. Seperti apakah keindahan yang diingini oleh setiap manusia sebagai warga negara atau Masyarakat yang berada dibawah payung pemeritahan yuridiksi tertentu. Masyarakat liberal dengan identitasnya masing-masing pasti memiliki kebebasan untuk merasakan keindahan itu sebagai sesuatu yang menyukakan hati, atau menyenangkan.

Keindahan tentu merupakan objek keinginan/kehendak manusia yang menjajikan kepuasan, kegembiraan, kelegaan, kekaguman, dan keterkesimaan. Thomas Aquinas melihat keindahan dan kebaikan adalah suatu yang sama. Karena keduanya merupakan obyek keinginan manusia. Indah atau cantik adalah menyangkut apa yang diingini, menjelaskan realitas kompleks dalam ukurannya yang seimbang. Keseimbangan atau keserasian mengatakan keutuhan/integritas. Apa yang integral memikat dan utuh. Keindahan juga sangat personal dalam diri seseorang, maka setiap orang karena keindahannya patut dihargai. Armada Ryanto (2022) memberi penekanan Ketika manusia adalah ‘aku,’ ia memiliki segala sketsa-sketsa seperti kebaikan, keindahan, kebenaran, keutuhan, ataupun kesempurnaannya. Keindahan menyangkut keseluruhan dari hidup manusia, termasuk di dalamnya apa yang mempengaruhi hidupnya dan realitas sosial politiknya sehari-hari. Manusia meski merupakan pribadi liberal, ia tidak dapat terlepas dari koadrat bahwa dirinya merupakan makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan orang lain. Kebutuhan akan orang lain telah mengantar manusia masuk pada realitas hidup bersama.

Realitas yang serasi dan seimbang selalu ada dalam tatanan keseharian manusia. Realitas hidup keseharian manusia Indonesia adalah berkebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan berbagai pulau, sehingga disebut Nusantara. Kepulauan di Indonesia memancarkan bermacam-macam keindahan, dari Sabang sampai Marauke. Negara kesatuan Republik Indonesia, hanya akan menjadi Bersatu bila realitas-realitas tersebut diterima sebagai kesatuan yang indah. Keindahan lain dari NKRI adanya budaya, suku, ras, latar belakang Sejarah, agama dan Bahasa yang berbeda-beda. Dari perbedaan inilah diperlukan Integritas atau kebersatuhan bangsa/negara Indonesia, harus seimbang dan utuh sehingga semuanya tampak indah dan memesona. Demi terciptanya, integritas dan kesatuan ini, bansa Indonesia menganut paham nasionalisme dan memiliki identitas nasional yang jelas dan teratur. Identitasnasional, seperti Bahasa nasional, bendera dan lambang negara adalah contoh konkret. Di Tengah kemajemukan dan keberagaman itu, Masyarakat Indonesia diikat dengan semboyan klasiknya “Bhinneka Tunggal Ika.”Dasar identitas nasional adalah karakteristik suatu bangsa. Kekhasan suatu negara dan warganya, mencerminkan jati diri bangsa. Bangsa dengan jati diri yang jelas adalah bangsa yan indah dan harmonis. Karakteristik dapat mencakup seluru pola perilaku individu, yang dipengaruhi faktor-faktor biologis, psikologis, atau

sosiologis. Pada dasarnya sesuai hakekat manusia yang secara koadrat adalah makhluk sosial, maka bangsa pada prinsipnya adalah sekelompok besar manusia. Manusia-manusia dalam satu bangsa adalah mereka yang memiliki kesamaan nasib dalam proses sejarahnya (Hendrizal, 2020).

Seperti kita ketahui di Indonesia merupakan bangsa manusia yang pernah dijajah tiga setengah abad oleh Belanda. Inilah kekhasan Sejarah manusia Indonesia. Dari Sejarah-sejarah inilah mulai terbentuk identitas bangsa. Identitas nasional ada sedemikian demi keutuhan warga Indonesia. Hal ini dikarenakan, ada Sejarah-sejarah tertentu yang mengatur individu secara lebih spesifik personal atau kelompok tertentu di suatu wilayah kebangsaan. Bangsa Indonesia, tidak bisa dideskripsikan hanya berdasarkan ciri fisik yang khas. Karena perlu diingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai pulau dengan bermacam-macam unsur etnis, ras, suku, budaya, agama dan Bahasa. Dengan demikian identitas nasional diperlukan. Dan identitas ini dapat dimengerti berdasarkan dimensi statis dan dinamis, dikarenakan relasi yang tak terbendung antara manusia dengan manusia lainnya. Karena itu identitas nasional Indonesia harus dipahami dalam konteks dinamis, antara manusia dengan manusia lain atau manusia dengan alam. Identitas nasional merujuk pada kesadaran kolektif dan pengenalan bersama terhadap suatu kelompok penduduk yang memiliki ciri-ciri bersama, seperti sejarah, budaya, bahasa, agama, atau nilai-nilai yang membedakannya dari kelompok-kelompok lain. Identitas nasional mencerminkan rasa solidaritas dan persatuan di antara anggota suatu negara atau bangsa. Pulchrum diindikasikan dengan kata baik, kuat, memikat. Bagi bangsa Yunani kecantikan/keindahan mengimplikasikan keserasian, keseimbangan, atau simetris. Hal ini dikemukakan oleh Demoritos. Dalam konteks masyarakat liberal dan identitas nasional itu adalah perjuangan progresif yang tidak putus oleh kerancuan-kerancuan tertentu. Baik kerancuan karena struktur kepemimpinan, kerancuan karena kuasa yang sewenang-wenang atau bahkan kerancuan karena harkat dan martabat manusia yang tidak diharagai, oleh individu, kelompok/golongan, maupun kelompok terhadap individua atau kelompok lain.

Masyarakat melihat Keindahan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Kehidupan yang indah, seperti dikatakan oleh beberapa filsuf bukan saja menyangkut seni. Karena seni bukan produk suatu keindahan, melainkan keindahan merupakan suatu yang secara idealis terikat atau melekat pada karya seni atau media seni. Media seni dapat mencakup segala hal yang universal. Alam, budaya, ras, Bahasa, musik, manusia dan semua yang terdapat di universum atau alam adalah media seni. Eindahan dari media seni itu bukan sekedar kesenangan indrawi, tetapi juga terletak di dalam hati. Identitas nasional itu indah dan liberalisme itu indah. Indah juga adalah pengalaman kebersamaan dan realitas hidup bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Identitas bisa mencakupi seluruh realitas hidup manusia. Termasuk realitas politik, ekonomi, sosial budaya, ras, dan bahasa adalah keindahan dalam keseharian. Keindahan mengandaikan realitas-realitas serasi dan seimbang. Keseimbangan yang dimaksud adalah keutuhan yang jelas. Keutuhan jelas dalam realitas kehidupan sehari-hari kita. Keutuhan itu memikat, memukau dan indah. Dari berbagai konsep keindahan tersebut, kita akan dituntun untuk memahami dan mengerti dengan realitas kehidupan keseharian kita. Keindahan ini merupakan integritas atau kebersatuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), sejauh utuh merupakan suatu yang memesona dan indah.

Identitas Nasional dan Liberalisme

Identitas dalam bahasa Inggris “identity” artinya tanda, ciri, jati diri, yang sangat berhubungan erat/melekat dalam diri seseorang. Baik secara individu, ataupun secara berkelompok seperti ras, suku, budaya, serta agama. Identity memberikan atau menyajikan antara satu dengan lainnya. Secara antropologi, istilah identitas ialah kekhasan atau sifat khas dengan kesadaran dan menerangkan sesuai kesadaran diri kelompok/golongan tersebut, komunitas atau negara. Lalu apa yang disebut identitas Nasional? Adapun identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa/negara. Dari kekhasan tersebut yang melekat pada suatu bangsa, menjadikan itu sebagai eksistensi bagi suatu negara sehingga dikenal oleh negara lain. Jati diri tersebut dapat diadopsi dari berbagai nilai-nilai budaya, yang kebenarannya dapat diterima secara umum dan diterima oleh masyarakat. Teori liberal sedang mengalami kesulitan dalam menyajikan visi positif tentang national identity (Identitas nasional). Bagaimana ia dapat menarik batasannya yang jelas seputar komunitasnya dan komunitas di luar darinya. Komunitas liberal ketika telah masuk pada suatu sistem, dengan sendirinya ia harus lebih memperhatikan terkait hak-hak universal manusia, apa yang baginya paling penting adalah hak asasi manusia (HAM).Inilah klaim universalisme masyarakat liberal, bahwa yang ditekan dalam deklarasi universal hak asasi manusia di beberapa negara di Eropa menjadi poin kunci liberal. Deklarasi ini menjelaskan bahwa “semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hal

yang sama.” Kesamaan harkat dan martabat inilah yang menjadi sorotan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dengan pembagian dan struktur yang jelas tidak di maksudkan untuk menghilangkan dan mengabaikan kebebasan besar manusia. Kebebasan pemerintah dalam memerintah tidak dapat dengan mudah merendahkan kaum kecil atau kaum bawah, yang tak berkuasa. Melainkan, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang telah disepakati dalam deklarasi ini. Bahwasanya tidak ada pembeda apapun seperti ras, suku, budaya, Agama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau kebebasan berbicara dan lain-lain. Di sinilah kita telah melihat adanya keindahan dalam kebersamaan kita sebagai satu negara yang memiliki keberagaman. Status sosial, ekonomi dan politik ataupun status lainnya tidak dibenarkan sebagai pembeda untuk individu memperoleh keadilan, kebebasan dan kebenaran yang ia inginkan dalam kehidupan bersama sebagai warga suatu negara.

Francis Fukuyama menegaskan bahwa para kaum liberal secara teoritis peduli terhadap pelanggaran HAM. Hak asasi manusia inilah yang kemudian membuat teori liberal tidak dapat memberi batasan-batasan yang jelas terkait bagaimana batas-batas nasional ditentukan. Untuk menentukan batas-batas ini kaum liberal memerlukan sebuah yuridikasi yang jelas. Semua orang atau masyarakat liberal perlu menjaga dan melindungi diri dengan menggunakan kekuatannya sendiri baik terhadap musuh internal atau musuh-musuh eksternal. Musuh masyarakat liberal adalah bagaimana ia dapat menciptakan sendiri batasan yang baik terhadap kebebasannya. Masyarakat liberal tentu akan berusaha menciptakan juga negara yang kuat dan tentunya kekuatan mereka harus dibatasi oleh negara melalui hukum. Dengan adanya hukum yang baik dan jelas, maka liberalisme tidak begitu semerawut atau kaum liberal secara radikal memainkan kekuasaan dan kebebasannya. Karena negara juga menghargai individu yang otonom maka kekuasaan negara melakukan kontrak sosial antar individu agar menyetujui hal mereka sebagaimana diperlukan oleh negara.

Max Weber berpendapat bahwa hak-hak liberal hanya akan bermakna jika mereka ditegakkan oleh sebuah negara, yang mempunyai monopoli sah atas hak mereka. Hak masyarakat liberal hanya dapat diatur oleh yuridiksi dimana masyarakat itu menetap, baik warga negara atau warga negara asing. Yuridiksi tentu akan tetap yang terutama memperhatikan hak-hak mereka, yakni untuk dihormati. Apabila sejalan dengan pemikiran Max Weber tersebut maka, sebetulnya tidak ada kontradiksi yang dibutuhkan antara universalisme liberal dan kebutuhan akan bangsa-bangsa. Kebutuhan bangsa atau Negera seakan menjadi problem besar bagi terjaminnya liberalisme. Liberalisme klasik yang sangat anti pemerintah akan terus menjadi problem yang dihadapi. Problem ini tentu merupakan akar konflik yang kerap terjadi saat ini terutama di Indonesia. Indonesia memang merupakan negara dengan identitas masyarakat yang berbeda. Dan bahkan Identitas nasional Indonesia masih menjadi sebuah perjalanan panjang untuk menjadi semakin sempurna dan indah secara universal. Keindahan akan identitas nasional merupakan harapan akan masa depan yang lebih liberal dan teratur.

Negara Indonesia sejauh ini merupakan suatu negara dengan kategori liberalisme yang rendah namun tidak menutup kemungkinan bahwa teori-teori liberal tetap berjalan agar dapat memberikan tingkatan yang jelas untuk setiap hak warga negara. Negara-negara liberal mampu memberi batasan hak karena ketidaksanggupan mereka untuk secara universal membatasi hak-hak masyarakat liberal. Masyarakat liberal atau individu yang jelas akan memiliki hak yang sama di bawah hukum namun dalam bidang tertentu batasan-batasan tidak semua mencakupi warga negara contohnya warga negara asing dan warga negara tetap memiliki hak khusus terutama hak untuk memilih. Pemerintahan Indonesia dalam memainkan perannya sebagai yuridiksi berhak melindungi hak warga negaranya dengan hukum. Hukum dimaksudkan untuk memberi batasan-batasan yang jelas sehingga masyarakat liberal lebih teratur dalam kebebasannya tidak memberi dampak negatif untuk kebebasan orang lain. Adapun kebebasan liberal yang penting diatur oleh negara adalah kebebasan politik, sosial dan ekonomi. Liberalisme tentunya sangat mempengaruhi perkembangan dalam bidang-bidang ini, kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi merupakan poin penting liberalisme klasik, sebagai contoh peran pasar bebas masyarakat liberal pada posisi tertentu memberi dampak positif namun juga dapat berdampak negatif. Oleh karena adanya dampak negatif maka negara harus mengambil peran agar sistem perekonomian ini lebih teratur dan tertata rapi.

Francis Fukuyama menyebutkan bahwa negara-negara merupakan unit budaya yang jelas dibatasi, dan ini merupakan hasil sampingan dari perjuangan sejarah yang dialami oleh suatu negara. Indonesia juga merupakan negara dengan identitas yang berbeda dari setiap suku, bahasa, agama, ras, atau etnis tertentu adalah bentukan dari latar belakang sejarah yang berbeda pula di setiap daerah. Daerah-daerah seputar

Pulau Jawa memiliki karakteristik kejawen oleh karena latar belakang sejarah Jawa. Atau orang Papua memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda dengan orang Jawa karena latar belakang sejarah yang membentuk mereka menjadi seorang yang berbudaya Papua. Karakteristik yang tetap seperti ras etnis, adat-istiadat atau warisan agama, barisan politik warisan budaya warna kulit dan lain-lain adalah sebuah keindahan mendalam dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Meskipun semuanya ini adalah suatu perbedaan yang besar tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia diikat oleh sebuah semboyan bhinneka Tunggal Ika, bahwa “berbeda kita tetap satu.” Dalam kebhinekaan kita harusnya tetap menanamkan sikap penghargaan terhadap liberal dan hak-hak individu sebagai manusia. Untuk alasan-alasan tertentu masyarakat liberal secara normatif seharusnya tidak mengakui kelompok-kelompok berdasarkan identitas-identitas tertentu saja seperti yang sudah disebutkan ras, entitas, atau warisan agama. Namun pada saat-saat tertentu kerap kali prinsip ini tidak berlaku dan gagal. Karena kegagalan-kegagalan dalam bidang tertentu liberalisme seakan memberi yang sangat kontradiktif terhadap identitas nasional. Oleh karena itu identitas nasional mulai mengadopsi bagian-bagian tertentu yang kemudian menyatukan keyakinan-keyakinan liberal seperti tradisi sastra, narasi sejarah, makanan khas, olahraga dan bahasa.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional. Identitas ini tentunya sangat penting di tengah keberagaman bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang sekarang ini tercatat lebih dari du ribu empat ratusan bahasa daerah yang dapat diteliti. Andai dengan latar belakang demikian identitas nasional tetap saja kurang jelas maka bagaimana kita dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik dan sejahtera. Kesejahteraan adalah dambaan setiap warga suatu negara dan juga dambaan dari masyarakat liberal agar haknya tidak terbatas tetapi juga tidak melanggar batasan. Identitas nasional sejauh ini memiliki bahaya yang jelas namun juga peluang. Fukuyama menyebutkan bahwa identitas nasional adalah konstruksi sosial yang dapat membentuk atau mendukung dan tidak sama sekali merusak nilai-nilai liberal. Itulah yang kemudian menjadi dambaan dari masyarakat liberal yang karenanya liberalisme tetap berjalan dan identitas nasional juga tetap ada. Identitas nasional di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Perancis telah mengalami kemajuan yang sangat besar. Suatu kemajuan yang jelas adalah progressive menghapus hambatan-hambatan terkait ras, kelas ekonomi, dan gender dalam kewarganegaraan. Kekurangan dan kelemahan lain identitas nasional adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan sangat diperlukan. Tetapi di sisi lain kekuasaan kerap kalian menjadi identik dengan penyalahgunaan kekuasaan. penyalahgunaan inilah menjadi penyelewengan hak kuasa, atau tindakan semena-mena terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Karena adanya kuasa seringkali terjadi korup. Korupsi menjadi masalah hangat setiap tahun perjalanan hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia seharusnya lebih ketat lagi dengan prinsip liberal dan juga Identitas nasional, agar keduanya jangan sampai meninggalkan jalur.

Peran kaum liberal dalam konteks ini adalah menyuarakan batasan kuasa dan kecangkokkan kekuasaan. Penguasa meskipun memiliki hak sah terhadap warganya, tetapi saja ia perlu memperhatikan prinsip identitas nasional bahwa nilai-nilai liberal haruslah didukungnya bukan merusakkannya. Korupsi merupakan suatu pelanggaran akan hak dan kurangnya perhatian akan keadilan dan kebenaran, bahkan sangat menentang hak asasi manusia/HAM dan kontra terhadap penghargaan akan harkat dan martabat manusia. Martabat manusia adalah perhatian utama liberalisme. Masalah perbedaan ras dan warna kulit yang dialami berapa negara di Eropa dan Amerika pra-tahun 1960-an, atau pertengahan abad 20 sangat membatasi imigrasi, dan dominan masyarakat adalah kulit putih. Masyarakat kulit hitam sama sekali dibatasi dengan pembeda yang jelas. Sehingga di Australia ada sebutan yang sangat terkenal adalah “white Australian”. Namun kemudian adanya progresif, dengan membangun Identitas nasional berdasarkan meteran non-rasial/tidak adanya ras. Kesulitan dalam perjuangannya ini adalah bagaimana menentukan Identitas bersama. Identitas nasional di Indonesia sejauh ini telah berhasil mengolah keberagaman. Meskipun dalam bidang lain belum terpenuhi. Seperti ketiadaan kekerasan, penganiayaan masih terjadi di mana-mana karena persoalan ras atau sistem sosial ekonomi dan politik tertentu. Identitas nasional sebagai masyarakat liberal sejatinya harus terbuka terhadap liberalisme. Adapun kemajuan dan peluang berkat identitas nasional adalah kemajuan di bidang pendidikan. Dalam bukunya yang berjudul The Ego and His Own, (1844), Max Stirner melihat pandangan kaum liberal terhadap pengembangan pendidikan, hak ini mengindikasikan bahwa pendidikan yang merupakan hak setiap individu liberal juga di atur oleh negara. Negara mengambil peran agar pengetahuan itu merata kemana-mana di seluruh plosok Nusantara. Indonesia merupakan negara

dengan kepulauan yang banyak sehingga dalam memperhatikan pendidikan setiap warga negara adalah perjuangan besar bagi negara. Hanyalah pendidikan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam hal ini masyarakat liberal dapat menuntut haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Liberalisme dan Identitas Nasional Sebagai Pulchrum Bangsa Indonesia

Bagaimana menemukan pulcrum masyarakat Indonesia di tengah liberalisme dan indentitas nasional, adalah sebuah refleksi panjang dan berkelanjutan. Kelanjutan dari pemahaman akan identitas nasional adalah harapan bersama, sebagai suatu bangsa. Bangsa Indonesia harus menerima apa yang sudah menjadi identitasnya. Identitas inilah yang akan memberi ciri khas bagi bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan, nilai-nilai budaya, kultur, ras, dan agama, serta suku, hanya akan menjadi lebih indah bila diantara kita saling menerima kemajemukan itu. Hal tertinggi dari menghargai dan menerima adalah martabat manusia. Bagaimana liberalisme klasik itu dipertahankan dan diperhatikan, hanya karena keluhuran martabat manusia. Manusia yang liberal, tidak dapat menjamin bahwa ia terlepas dari negara. Negara akan mengatur Masyarakat liberal, sehingga sedemikian rupa terstruktur sehingga konflik-konflik yang diinginkan tidak terjadi. Seperti halnya, yang terjadi di Amerika dan Eropa pada paru abad Sembilan belas. Rasisme, terhadap kaum kulit hitam dan melihat mereka bukan sebagai manusia. Atau perang-perang demi kelompok atau kekuasaan akan suatu wilayah, sebaikan jangan ada lagi. Martabat manusia dasar Liberalisme klasik, bahwa hak asasi merupakan acuan dasar kehidupan bersama. Perwujudan konkret dari pengakuan akan martabat manusia yang Istimewa dapat dilihat dari sikap hormat terhadap HAM. Hak asasi setiap orang patut dijunjung tinggi dalam relasi antar manusia. Hak-hak asasi tersebut melekat dalam diri manusia, hanya karena dia adalah manusia dan karena hal itu bukan karena diberi oleh pihak lain, termasuk negara. Hak asasi adalah individual, dan merupakan baigian dari hak moral. Hak yang bersemayam dalam diri seseorang. Dalam kemanusiaannya. Sumbernya adalah martabat atau nilai moral manusia sendiri, hak-hak seseorang menghendaki orang-orang lain menghargainya.

Perihal menghargai adalah tidak merugikan pihak manapun demi keuntungan kelompok atau individu tertentu saja. Tetapi penghormatan adalah pintu depan yang terus terbuka dengan situasi-situasi konkret yang majemuk itu. Adakalanya kita berada pada posisi minoritas atau mayoritas. Setiap orang sebagai pribadi yang bebas meyakini dirinya memiliki hak berpikir dan mengeluarkan pendapat pada suatu perkumpulan, komunitas, Masyarakat atau negara. John Locke, sebagai seorang yang sangat mendukung hukum kodrat, mengemukakan pendapatnya bahwa, semua individu sudah dikarunia hak alami yang inheren atas kehidupannya, kebebasannya, bahkan segala harta benda mereka adalah milik mereka sendiri dan tidak dibenarkan negara dapat mencabutnya. Bagaimana negara mencabut hak warganya, dapat dilihat dari kasus-kasus korupsi yang kerap terjadi, atau kolusi dan nepotisme pemerintah. Hal ini sering terjadi dalam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia hanya akan menjadi suatu bangsa yang indah, adil, benar, bersatu dan serasi apabila mulai menjaga keadilan dan membatasi keseweng-wenangan atau penyalagunaan kekuasaan. Penguasa harus menghargai Masyarakat kecil, kaum buruh dan miskin. Memberikan pengetahuan dan sarana pendidikan yang merata di pelosok kepulauan Nusantara.

Masyarakat adalah penentu kekuasaan, seperti yang kita kenal dalam paham demokrasi bangsa Indonesia. Dapat dilihat dari suatu kontrak sosial, bahwa penggunaan hak-hak mereka, (masyarakat) tidak dapat dicabut, itu telah diserahkan kepada penguasa/pemerintah di bawah payung hukum. Maka, bila penguasa/pemerintah melanggar hak-hak koادرat individu tersebut, dan memutuskan kontrak sosial itu, rakyat dapat juga mengganti penguasa/pemerintah yang lebih baik dan bermartabat dengan pedoman akan menghargai dan mampu menghormati hak-hak rakyat/individu tersebut sebagai yang bermoral. Liberalisme taat pada negara dan berkontribusi bagi negara, serta tunduk di bawah hukum, juga negara wajib menghargai martabat mereka sebagai manusia yang berhak dilindungi oleh hukum. Di sanalah akan tercapai apa yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas bahwa keindahan itu adalah kebaikan bersama. Ia berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari kebaikan moral.

KESIMPULAN

Memaknai liberalisme dan identitas nasional sebagai suatu keindahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia dengan segala kemajemukannya adalah satu kesatuan utuh yang dapat diterima baik sebagai keindahan. Keindahan adalah mencakup keseluruhan eksistensi bangsa Indonesia. Negara kita ini merupakan suatu negara dengan keindahan-keindahan yang banyak, baik itu alam, budaya,

suku, ras, dan kepercayaan yang sangat kaya. Sebagai manusia yang berbudi luhur, ingin dihargai sebagai manusia liberal, dan kita juga dituntut untuk menghargai hak-hak orang lain. Kita tidak bisa memaksa dengan hak kita agar dengan segala kekhasan kita, seperti halnya suku, budaya, kebiasaan, ras selekas mungkin diterima sebagai identitas bersama. Namun, negara telah membuat ketentuan agar ada dimensi budaya tertentu yang bisa diakui sebagai identitas nasional. Seperti bahasa, lambang negara, atau ideologi negara. Maka, sebagai negara yang liberal dan memiliki identitas nasional yang jelas, maka kita akhirnya boleh memetik keindahannya dan merenungkan terus akan keindahan hidup berbangsa dan bernegara kita. Masyarakat dan pemerintah sejalan menuju keindahan yang utuh dengan tetap mengedepankan pri kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Sambut dan Jaga Keutuhan Indonesia Kunci Supaya Tetap Utuh dan Bisa Sejahtera. 2045: Revolusi Kembali Ke Sistem Ekonomi Pancasila & Tolak Sistem Ekonomi Neoliberal,” 2021.
- Aquinas, Thomas. Argumen Ontologis, (*Summa Theologiae*) n.d., 23–27.
- Aziz, Aulia Luqman. “Penguatan Identitas Bahasa Indonesia Sebagai Lambang Identitas Nasional Dan Bahasa Persatuan Jelang Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.” *Studi Sosial* 6, no. 1 (2014): 14–20. <http://lp2m.um.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/31.pdf>.
- Bakar, M Yunus Abu. “Pengaruh Paham Liberalisme Dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia” 8, no. 1 (n.d.): 135–60.
- Ceunfin, Frans. *Hak Asasi Manusia: Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik*. Pertama. Maumere: Ledalero, 2004.
- Dwibala, Gerardus Evam. *Keadilan: Liberalisme dan Komunitarianisme Serta Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia /Pemikiran_politik_Ralws Academia.Edu*, 1996. <https://www.academia.edu/download/572356155>.
- Fukuyama, Francis. *Liberalism and Its Discontents*. New York: Profile Books, 2022.
- Hendrizal. “Mengulas Identitas Nasional Bangsa Indonesia Terkini.” *Jurnal PPPKn & Hukum* 15, no. 1 (2020): 1–21. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/download/7877/6763>.
- Hermawan, Agus Konsep Keindahan Dalam Perspektif Thomas Aquinas (*Kajian Terhadap In Librum Beati Dionysii De Divinis Nominibus Expositio*),” 2016.
- Hien, Yap Thiam. *Negara HAM Dan Demokrasi*. Jakarta: YLBHI, 1998.
- Kariasa, I Nyoman, I Wayan Diana Putra, Menentukan Garapan, and I Wayan. “Karya Karawitan Baru ‘ Manikam Nusantara ’” 36 (2021).
- Kusniati, Retno. “Rule Of Law; Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum,” 2011.
- Latuheru, Angel Christy, Izak Y. M. Lattu, and Tony Robert Tampake. “Pancasila Sebagai Teks Dialog Lintas Agama Dalam Perspektif Hans-Georg Gadamer Dan Hans Kung.” *Jurnal Filsafat* 30, no. 2 (2020): 150. <https://doi.org/10.22146/jf.49193>.
- Luthfia, Raisa, Ayu dan Anggraeni Dewi, Kajian Deskriptif Tentang Identitas Nasional Untuk Integrasi Bangsa Indonesia.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2021): 391–397–391–397. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/270>.
- Madung, Otto Gusti. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Diskursus Liberalisme Versus Multikulturalisme “Perspektif Filsafat,” n.d., 1–208.
- Mises, Ludwing Von. *Menemukan Kembali Liberalisme*. Pertama. New York: Feedom Institute, 1985.
- Novianti, Linda. *Politik Hukum Indonesia Yang Berkaitan Dengan Statuta Roma Dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas* Jurnal Khazanah Hukum, 1 (2021): 34–46. <Https://Doi.Org/10.15575/Kh.V3i1>.
- Padli, M. Syaiful, dan M. Lutfi Mustofa. Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Serta Aktualisasinya Dalam Men-Screening Berita. *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 1 (2021): 78. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.31892>.
- Putra, Gerwin Bernardus, and F.X. Armada Riyanto. “Menelisik Politik Identitas Di Kalimantan Barat Berdasarkan Perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto.” *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 9. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64948>.

- Rahardjo, Turnomo. Memahami Kemajemukan Masyarakat Indonesia (Perspektif Komunikasi Antarbudaya) 2018
- Riyanto, Armada, marcelius Ari Christy, Paulus Punjang Widodo. Aku Dan Lyan, Kata Filsafat Dan Sayap. Malang: widya Sasana Publikasi, 2011.
- Riyanto, E Armada. Krisis Paham Kenegaraan : Dalam Konstitusi Indonesia Abstract :" 1945 (1945): 79–99.
- Riyanto, F X Eko Armada. Relasionalitas; Filsafat Fondasi Interpretasi, Aku, Teks, Lyan, Fenomen. Lima. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Riyanto, Armada. Menjadi-Mencintai. Pertama. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- S, Agustina Dewi. "Identitas Ke-Indonesiaan Melalui Panyandra," No. 1 (2001): 257–64.
- S, Anastasia Jessica Adinda. Membentuk Identitas Indonesia. Prosiding Simposium Nasional V, 2016.
- Saragih, Elza L L. "Satu Rasa Dalam Keindahan Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Dua" 1, no. 3 (2023).
- Setiarsih, Ari. "Kata Kunci : Identitas Nasional, Kearifan Lokal, Pendidikan Multikultural.," n.d.
- Sihombing, Eka N.A.M. "Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 6, no. 1 (2019): 70. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>.
- Siti Hasanah. "Kemakmuran Hidup Manusia." Analisis Pemikiran Francis Bacon Tentang Ilmu Pengetahuan Dan Kemakmuran Hidup Manusia, 1996, 1–27.
- Suryanto, Fransiskus, Rino. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi Di Indonesia Menurut Soekarno 3, no. 6 (2023): 8–13.
- Supriyanto, Bambang Heri, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014. 151
- Surajiyo, "Keindahan Seni Dalam Perspektif Filsafat, Jurnal Teknik Informatika" Jakarta Selatan.n.d., 157–68.
- Sudagung, Adityo Darmawan, Arry Bainus, and Abdul Musyawardi Chalid. "Kerjasama Pembangunan Indonesia Dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme Dalam Hubungan Internasional." JIPSI-Jurnal Ilmu Politik ... V, no. 1 (2015): 31–41. <https://repository.unikom.ac.id/30706>.
- Tarrapa, Setrianto. "Implementasi Pendidikan Agama Kristen Yang Relevan Dalam Masyarakat Majemuk Sebagai Dimensi Misi Gereja." KURIOS 7, no. 2 (October 7, 2021). <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.308>.
- Tazkiyah, Destyanisa. "Keindahan Terselubung Web Series Sore : Kajian Estetika" 14, no. 4 (2019): 549–57.
- Tonta, Rex Firenze, and Pius Pandor. "Menggali Nilai Pancasila Dalam Tarian Raego Topo Uma Dengan Perspektif Filsafat Fenomenologis Armada Riyanto." Jurnal Studi Budaya Nusantara 7, no. 1 (2023): 1–10.
- Wahyuni, P.S.I., I.W. Rasna, and I.B. Putrayasa. "Representasi Ideologi Liberalisme Dalam Kumpulan Cerpen LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, Dan Transgender) Penjara Karya Moch. Satrioweling, Dkk." Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia 10, no. 1 (2021): 81–97.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Neo-Liberalisme, Good Governance Dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum Jentera XV 24, no. 3 (2007): 363.
- Zulaiha, Eni, Restu Ashari Putra, and Rizal Abdul Gani. "Selayang Pandang Tafsir Liberal Di Indonesia." Jurnal Iman Dan Spiritualitas 1, no. 2 (2021): 151–56. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.11700>.